



# RENCANA KERJA TAHUN 2023

**BADAN  
PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KOTA  
PONTIANAK**

**JL. LETJEND. SUTOYO NO. 71**



## **KATA PENGANTAR**

Pembuatan Rencana Kerja adalah bagian dari manajemen kinerja yang baik. Rencana kerja yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program dan perencanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis BPBD Tahun 2020 - 2024. Renja ini merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban. Renja disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak.

Demikian penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 dibuat sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi BPBD Kota Pontianak, dan dapat memberikan kontribusi keberhasilan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Pontianak.



## Daftar Isi

Cover .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud.....	6
1.4 Tujuan.....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN LALU.....</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	23
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.....	32
2.4 Review terhadap rencana awal OPD.....	35
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	39
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPBD.....</b>	<b>40</b>
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional .....	40
3.2 Tujuan dan sasaran renja BPBD.....	43
3.3 Program dan Kegiatan .....	46
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>50</b>
4.1 Rencana kerja BPBD .....	50
4.2 Pendanaan program kerja BPBD .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perbuahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman bagi Organisasi Peringkat Daerah untuk membuat sebuah rencana kerja. Rencana Kerja yang disusun merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengarahkan organisasi mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis BPBD Tahun 2020 – 2024. Renja ini merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban. Rencana Kerja ini sejalan dengan visi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak yaitu *“Pontianak Kota Khatulistiwa berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”*. Renja ini ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Badan Penanggulangan



Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perbuahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standard Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.





17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak tahun 2005 S/D 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak;
23. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 20);





### **1.3 Maksud**

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak untuk tahun 2023 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak.

### **1.4 Tujuan**

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak ini bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.



## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN LALU**

Menerangkan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun 2020 dan capaian Renstra BPBD, Analisis kinerja pelayanan BPBD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD, Review terhadap rencana awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPBD**

Tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran target Kinerja BPBD 1 (satu) tahun kedepan.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD**

Memuat telaahan terhadap Rencana Kinerja yang menjelaskan Program, Kegiatan dan Pendanaan BPBD 1 (satu) tahun kedepan

## **BAB V PENUTUP**

Ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja BPBD.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra BPBD**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak sebagai institusi (Perangkat Daerah) yang mempunyai tugas pokok di bidang penanggulangan bencana di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam mewujudkan rasa aman dari ancaman bencana.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya BPBD Kota Pontianak memiliki 2 Program dan 10 Kegiatan dengan total pagu pada sebesar Rp 4.777.154.575,-. Namun pada awal tahun terjadi refocusing dan perubahan pagu sehingga Total Pagu Anggaran berkurang menjadi Rp 3.950.505.757,- hal ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai target awal sehingga realisasi kinerja tidak maksimal. Rincian pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada dapat dilihat pada uraian berikut:

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Program ini terdiri dari 6 kegiatan dan dan 17 sub kegiatan. Rincian kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut:

###### **1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Keluaran dari sub kegiatan ini adalah 9 Dokumen yang terdiri dari dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja), Rancangan Akhir Renja, Renja Perubahan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kebutuhan



Barang Umum (RKBU), Rencana Kerja Anggaran (RKA), RKA Perubahan, dan SAKIP (Logical Framwork, Cascading, Kertas Kerja Evaluasi, dan Rencana Aksi).

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keluaran dari sub kegiatan ini adalah 9 Dokumen yang terdiri dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan SPIP Semester 1 dan SPIP Semester 2, Laporan Evaluasi Renja triwulan 1 sampai triwulan 4.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Keluaran dari sub kegiatan ini adalah 7 Dokumen yang terdiri dari Roadmap Reformasi Birokrasi (Lembar Kerja 1-7), Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LKE PMPRB), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) semeseter 1 dan semester 2, Laporan Evaluasi SAKIP dan Laporan Evaluasi RB.

## **1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan.

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya laporan keuangan dan pelaksanaan akuntansi selama 12 bulan.

## **1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Beserta Atribut Kelengkapannya

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) sebanyak 44 stell, dan pakaian petugas kebersihan sebanyak 2 stell. Tujuan



dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk keseragaman aparatur dalam berpakaian sehingga berdampak pada peningkatan disiplin dan semangat kerja aparatur.

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Keluaran kegiatan ini adalah adanya diklat/bimtek/workshop/kursus dan lain-lain demi terpenuhinya peningkatan kualitas SDM BPBD Kota Pontianak. Kegiatan ini tidak teralisasi dikarenakan anggaran kegiatan ini di refocusing namun masih dapat dilaksanakan melalui zoom (via online).

#### **1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran kegiatan ini adalah terciptanya penerangan kantor yang memadai dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kantor berupa filling cabinet 1 unit, AC 2 unit, speaker 1 unit, dispenser 1 unit, laptop 1 unit, PC 2 unit UPS 2 unit dan printer 2 unit. Namun semua pengadaan ini di refocusing sehingga target 12 unit tidak dapat tercapai. Untuk Perelengkapan kantor, kegiatan ini berisi penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan.

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya makan, minum, makan rapat, tamu dan penambah daya tahan tubuh dengan



capaian kinerja selama 12 bulan.

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Keluaran kegiatan ini adalah tercapainya pelayanan yang optimal dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya langganan media massa dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah berupa rapat-rapat koordinasi yang dilakukanselama 12 bulan.

### **1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya tagihan rekening telephone, air, listrik dan internet dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya honor pengelola keuangan dan pengelola kegiatan, belanja alat pembersih serta jasa tenaga harian lepas dengan capaian kinerja selama 12 bulan.

### **1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan dan terbayarnya pajak kendaraan roda empat pejabat



eselon II sebanyak 1 unit, kendaraan roda dua sebanyak 4 unit, kendaraan roda empat patroli sebanyak 1 unit dan speedboat sebanyak 2 unit.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. Keluaran kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor berupa pc/laptop sebanyak 7 unit, printer sebanyak 8 unit dan AC sebanyak 9 unit.

## 2. Program Penanggulangan Bencana

### 2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana

Output atau keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Pontianak. Dokumen KRB yang ada saat ini adalah dokumen KRB periode 2017-2021 sehingga output sub kegiatan ini adalah tersusunnya KRB 2022-2026, namun dikarenakan refocusing sub kegiatan ini tidak dapat terealisasi.

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Kegiatan ini terdiri dari Sosialisasi tatap muka, Pemasangan rambu peringatan dini, dan pameran sadar bencana. Sosialisasi tatap muka dilaksanakan selama 1 hari dengan peserta berasal dari TRC BPBD Kota Pontianak dan Relawan dari berbagai komunitas yang ada di Kota Pontianak dengan tujuan dapat meningkatkan wawasan dan sadar bencana. Selain melalui sosialisasi tatap muka penyampaian informasi juga dilaksanakan melalui sarana informasi peringatan dini kebakaran lahan. Sarana informasi yang dimaksud berupa pemasangan papan peringatan dini, brosur/famplet maupun spanduk di beberapa wilayah yang rawan kebakaran lahan.





Namun untuk pameran sadar bencana pada tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan karena pagu sub kegiatan ini telah di refocusing.

## **2.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Keluaran dari kegiatan ini adalah warga negara yang mendapat pelatihan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat umum dalam mengurangi risiko bencana melalui dari pemberian materi singkat tentang kebencanaan dan simulasi kejadian bencana. Namun pada tahun 2020 kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena pandemi COVID-19.

- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Keluaran kegiatan ini adalah koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana dan jumlah jenis sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Namun pada tahun 2020 kegiatan koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana tidak dilakukan karena mekanisme penerapan pusdalops tidak diterapkan. Sementara itu pengadaan peralatan dan penanggulangan bencana pada tahun 2020 berupa selang penghantar sebanyak 6 roll, sepatu pengaman sebanyak 10 pasang, kopleng sambungan, sebanyak 1 unit, nozel sebanyak 2 unit.

- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana



- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Keluaran kegiatan ini adalah terbentuknya kelurahan tangguh bencana. Untuk tahun 2020, ditargetkan 1 (satu) kelurahan yang terbentuk, yaitu Kelurahan Bansir Darat di Kecamatan Pontianak Selatan. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan melibatkan unsur kelurahan dan masyarakat setempat, dengan harapan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat dalam mengurangi risiko bencana.

- Penyusunan Rencana Kontinjensi

Output atau keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen Rencana Kontinjensi (Rekon). Pembuatan Rencana Kontinjensi (kebakaran hutan dan lahan) dilakukan dengan mengundang berbagai instansi terkait penanggulangan bencana seperti dinas kesehatan, dinas perkim, dinas sosial, dinas LH, tni/polri, kecamatan dan kelurahan, bpbd provinsi, damkar, pmi juga komunitas relawan kemanusiaan seperti rumah zakat dll. Pada Tahun 2020, dokumen Renkon yang disusun adalah Dokumen Renkon Penanggulangan Karhutla sehingga dokumen ini dapat digunakan untuk pedoman teknis semua pihak terkait ketika terjadi bencana karhutla dari skala kecil hingga skala besar.

- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Output atau keluaran dari kegiatan ini adalah warga negara dan aparatur yang mendapat pelatihan. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari Pembuatan Renkon. Dalam dokumen Renkon terdapat

pedoman teknis penanggulangan karhutla sehingga kegiatan ini merupakan praktek atau gladi dari dokumen Renkon penanggulangan karhutla tersebut

### 2.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Output atau keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan piket Tim Reaksi Cepat (TRC). Kegiatan ini merupakan kegiatan piket kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana yang melibatkan seluruh anggota Tim Reaksi Cepat, dengan tujuan agar saat terjadinya bencana, anggota TRC selalu siap dan tanggap dalam menanggulangi bencana. Tim piket juga berkewajiban melakukan patroli dan membuat laporan guna memantau daerah-daerah rawan bencana, agar selalu terjaga kondisi yang kondusif.

- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kegiatan ini merupakan kegiatan penanganan tanggap darurat bencana. Output dari kegiatan ini adalah jumlah kejadian bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang ditangani dengan target 100%. Selama tahun 2021 kejadian bencana yang terjadi di Kota Pontianak adalah sebanyak **35** kejadian yakni **4 kali bencana puting beliung dan 31 kejadian karhutla**. Dengan jumlah rumah terdampak puting beliung sebanyak 7 rumah dan total **24 jiwa**. Selain itu telah dilakukan upaya pencarian dan evakuasi **korban tenggelam** sebanyak **3 orang**.

- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban



### Bencana Kabupaten/Kota

Output atau keluaran kegiatan ini adalah persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan dasar. Korban bencana yang mendapat bantuan dasar adalah korban bencana kebakaran bangunan. Dari total kejadian kebakaran bangunan pemberian makanan siap saji dan logistik dinilai berdasarkan hasil assessment. Bantuan kebutuhan dasar yang diberikan berupa kebutuhan dasar (makanan siap saji) selama 3 hari, bantuan logistik, bantuan sandang, perlengkapan bayi dan lain sebagainya, yang bersumber dari dana APBD maupun dari BNPB berupa *buffer stock* yang selalu tersedia di gudang BPBD Kota Pontianak.

#### - Aktivitas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Kegiatan ini merupakan kegiatan tanggap darurat bencana, yang mengakomodir seluruh biaya yang ada saat terjadi situasi tanggap darurat ketika telah dikeluarkannya SK Komando Tanggap Darurat Bencana. Pada tahun 2021 BPBD mengeluarkan SK tanggap darurat bencana karhutla sebanyak 1 SK.

## 2.4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

#### - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Output dari kegiatan ini adalah dokumen SOP yang tersusun. Pada tahun 2021 telah dilakukan revisi SOP yang ada dengan mengganti dan menambah SOP yang tidak relevan dengan tupoksi dan program kegiatan di BPBD Kota Pontianak.



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak s/d Tahun 2021**

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(out comes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode RenstraSKPD) Tahun 2024	Realisasi TargetKinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja BPBD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPBD s/d tahun berjalan (2022)				
					Target Renja BPBD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja BPBD tahun 2021 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat													
Bidang Urusan : Penanggulangan Bencana													
1	5	3		<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
1	5	3	2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	33,33%	100%	100%	100%	-	-	
1	5	3	2	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	-	-	-	-	-	
1	5	3	2	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	66,67%	100%	100%	100%	-	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(out comes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode RenstraSKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja BPBD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPBD s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja BPBD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja BPBD tahun 2021 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 5 3 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	51,02%	100%	100%	100%	100%	-	-
1 5 3 2 1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	0	-	-	-	-	-	-
1 5 3 2 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100%	0	100%	0	0	100%	-	-
1 5 3 2 3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	57,14%	100%	100%	100%	100%	-	-
1 5 3 2 4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
1 5 3 2 6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	7 Kelurahan	1 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100%	1 Kelurahan	-	-
		Jumlah sekolah tangguh bencana yang terbentuk	4 Sekolah	-	1 Sekolah	1 Sekolah	100%	1 Sekolah	-	-
1 5 3 2 9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1 5 3 2 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(out comes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode RenstraSKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja BPBD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPBD s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja BPBD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja BPBD tahun 2021 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 5 3 2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1 5 3 2 2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1 5 3 2 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari di tolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1 5 3 2 4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan makanan siap saji dan logistik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1 5 3 2 5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%	0	100%	100%	-	-
1 5 3 2	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase SOP yang dibuat</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1 5 3 2 1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SOP yang dibuat	10 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	-	-





Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(out comes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode RenstraSKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja BPBD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPBD s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja BPBD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja BPBD tahun 2021 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 5 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1 5 1 2	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>25 dokumen/laporan</b>	<b>25 dokumen/laporan</b>	<b>25 dokumen/laporan</b>	<b>25 dokumen/laporan</b>	<b>100%</b>	<b>25 dokumen/laporan</b>	-	-
1 5 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	-	-
1 5 1 2 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	-	-
1 5 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	7 laporan	-	-
1 5 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan</b>	<b>60 bln</b>	<b>12 bln</b>	<b>12 bln</b>	<b>12 bln</b>	<b>100%</b>	<b>12 bln</b>	-	-
1 5 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	-	-
1 5 1 2 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	-	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(out comes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode RenstraSKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja BPBD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPBD s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja BPBD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja BPBD tahun 2021 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 5 1 2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya</b>	21 orang	21 orang	22 orang	22 orang	100%	19 orang	-	-
1 5 1 2 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	235 stell	21 stell	22 stell	22 stell	100%	12 bln	-	-
1 5 1 2 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	10 orang	0	1 orang	0	0	2 orang	-	-
1 5 1 2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jangka waktu penyelenggaraan adminstrasi umum perangkat daerah</b>	<b>60 bln</b>	<b>12 bln</b>	<b>12 bln</b>	<b>12 bln</b>	<b>100%</b>	<b>12 bln</b>	-	-
1 5 1 2 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	-	-
1 5 1 2 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	65 unit	9 unit	12 unit	0	0	6 unit	-	-
1 5 1 2 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	-	-
1 5 1 2 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	-	-
1 5 1 2 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	-	-
1 5 1 2 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	-	-



Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(out comes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode RenstraSKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja BPBD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPBD s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja BPBD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja BPBD tahun 2021 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Target RenjaBPBD tahun2021 (n-2)
1 5 1 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	-	-
1 5 1 2 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	-	-
1 5 1 2 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	-	-
1 5 1 2	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>249 unit</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1 5 1 2 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	38 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%		-	-
1 5 1 2 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	201 unit	32 unit	32 unit	32 unit	100%	37 unit	-	-
1 5 1 2 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	-	-	-	-	1 unit	-	-
1 5 1 2 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	-	-	-	-	1 unit	-	-



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Setiap organisasi memerlukan suatu alat pengukuran yang bersifat strategis, komprehensif dan seimbang untuk mendorong perbaikan secara berkesinambungan. Pengembangan dan pengukuran kinerja yang tepat mengharuskan berbagai perspektif penting dapat dicakup sehingga dalam proses pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja tidak terjadi salah arah.

Sesuai Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang telah diperbarui dan disesuaikan dengan SPM. Adapun target dan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai untuk tahun 2020-2021 dan target serta proyeksi untuk tahun 2020 – 2023 pada indikator sasaran adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak

NO.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)		√	0.53	0.55	0.58	0.60	0,45*	-	0.58	0.60	*Kategori Sedang
	Persentase Kejadian Bencana yang berhasil ditanggulangi			100%	100%	100%	100%	100%				
	Persentase warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	√		100%	100%	100%	100%	100%				

NO.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	√		100%	0	0	0	0				Tidak dapat dilaksanakan karena refocusing
	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	√		100%	100%	100%	100%	100%				
	Persentase warga negara yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	√		100%	100%	100%	100%	100%				

NO.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal	√				100%						
	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	√		100%	100%	100%	100%	0*				Tidak dapat dilaksanakan karena refocusing
	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	√		100%	100%	100%	100%	100%				
	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk			4 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	4 kelurahan				
	Jumlah sekolah tangguh bencana yang terbentuk			1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah				



NO.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	√		100%	100%	100%	100%	100%				
	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	√		100%	100%	100%	100%	100%				
	Persentase warga negara yang mendapat pelayanan evakuasi korban bencana	√		100%	100%	100%	100%	100%				
	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	√		100%	100%	100%	100%	100%				
	Persentase jumlah korban berhasil dicari di tolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	√		100%	100%	100%	100%	100%				

NO.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan makanan siap saji dan logistik			100%	100%	100%	100%	100%				
	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	√		100%	100%	100%	100%	0*				Tidak dapat dilaksanakan karena refocusing
	Persentase SOP yang dibuat			100%	100%	100%	100%	100%				
	Jumlah SOP yang dibuat			100%	100%	100%	100%	100%				

Dari tabel pengukuran kinerja di atas dapat dijelaskan hasil capaian indikator sasaran BPBD Kota Pontianak untuk tahun 2021 sebagai berikut :

**a. Indeks Kapasitas Daerah (IKD)**

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021 yaitu Terwujudnya Kota yang Aman dan Tertib yang tercermin dengan capaian Indikator dari Indeks Kapasitas Daerah (IKD) secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

***Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021***

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,50	0,45*	84,91%

Sumber : Buku IRBI Tahun 2021

Dari tabel pada Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator Indeks Kapasitas Daerah.

Indeks Kapasitas / Ketahanan Daerah (IKD) sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah terhadap kemampuannya dalam menghadapi bencana, dengan asumsi

bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia). Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kabupaten / kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.

Untuk tahun 2020 Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak adalah 0,47. Pada tahun 2021 realisasi perhitungan IKD Kota Pontianak adalah sebesar 0,45 atau naik sebesar 0,02 dari IKD tahun sebelumnya. Dengan kata lain Indeks Kapasitas / Ketahanan Daerah Kota Pontianak berada dalam kategori “Sedang”, dimana semakin tinggi nilai IKD berarti semakin tinggi juga Kapasitas / Ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana. Realisasi nilai IKD Kota Pontianak tahun 2021 sebesar 0,45 lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan untuk tahun 2021, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak adalah “Berhasil”, dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 84,91%.

Adapun program yang mendukung tercapainya indikator sasaran ini adalah Program penanggulangan bencana dengan rincian kegiatan sebagai berikut:



1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan sub kegiatan pendukungnya yaitu :
  - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
  - Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dengan sub kegiatan pendukungnya yaitu :
  - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
  - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
  - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - Penyediaan Peralatan Perlindungan Terhadap Bencana
  - Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon)
  - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
  - Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
4. Penataan Sistem Dasar Darurat Bencana
  - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD**

Bencana merupakan hal yang tak terduga dan acap kali terjadi. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan tindak tanggap terhadap kejadian bencana, maka Pemerintah Kota Pontianak membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas mewujudkan sistem pelayanan, penanganan dan penanggulangan bencana yang berkualitas, profesional dan terpadu. Dalam operasionalnya di BPBD terdapat Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana dan juga dibantu oleh Relawan Tim Reaksi Cepat Penanganan



Bencana.

Kejadian bencana yang kerap kali terjadi di Kota Pontianak adalah bencana kebakaran, banjir, kebakaran lahan yang menyebabkan kabut asap, dan angin puting beliung. Untuk menanggulangi bencana-bencana tersebut dilakukan berbagai sosialisasi dan penanggulangan tanggap bencana baik kepada masyarakat umum maupun kepada kelompok masyarakat serta anggota pemadam kebakaran swasta. Disisi lain tim reaksi cepat akan segera aktif apabila terjadi bencana dengan memberikan bantuan yang diperlukan bagi korban seperti bantuan kebutuhan dasar (sandang), bantuan makanan siap saji, serta bantuan konseling.

Dalam penanggulangan setiap kejadian bencana, BPBD berwenang mengkoordinasikan setiap aksi tindak penanganan dari berbagai komponen tanggap bencana yang ada. Disamping itu BPBD juga berwenang mengkoordinasikan setiap bantuan penanganan pasca bencana dari berbagai pihak/donor sehingga diharapkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Kompleksnya kehidupan masyarakat perkotaan serta terus bergulirnya pembangunan fisik kota menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan terhadap kota. Disisi lain dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, BPBD Kota Pontianak dituntut untuk dapat memberikan pelayanan seiring dengan permasalahan yang timbul dalam perkembangan Kota Pontianak, khususnya dari segi pencegahan dan penanggulangan bencana. Untuk itu diperlukan skala prioritas untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi, dimulai dengan mengidentifikasikannya secara rinci sesuai perkembangan riil yang terjadi berikut dijelaskan secara rinci berbagai permasalahan dan isu strategis yang berkembang di Kota Pontianak, yang berkenaan dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Pontianak :

1. Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan banjir.
2. Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat kondisi fisik kota berupa dataran flat, ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan bangunan, penyempitan dan penutupan saluran serta perubahan iklim yang ekstrim.
3. Bencana asap pada musim kemarau karena pembakaran lahan yang terjadi di Kota Pontianak dan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat lainnya berdampak pada kondisi udara di Kota Pontianak. Kebakaran lahan dipicu oleh pembukaan lahan untuk pemukiman dan pertanian.
4. Adanya Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang larangan membakar lahan, merupakan issue strategis dalam mengurangi



kejadian kebakaran lahan, namun perwa ini masih perlu sosialisasi dan koordinasi antar instansi dalam penerapannya.

5. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran yang dapat menyebabkan genangan bahkan banjir.

## **2.4 Review terhadap Rencana Awal BPBD**

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPBD Kota Pontianak, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Dalam dokumen Renja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Pontianak. Disamping itu, dokumen Renja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Review terhadap rancangan awal BPBD ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan BPBD dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD. Review terhadap Rancangan Awal BPBD tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut :





**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Badan**  
**Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penanggulangan Bencana	Pontianak	Persentase kejadian bencana yang berhasil di tanggulangi	100%	1.038,241,401	Program Penanggulangan Bencana	Pontianak	Persentase kejadian bencana yang berhasil di tanggulangi	100%	1,038,241,401	
1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pontianak	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	396,329,800	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pontianak	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	396.329.800	
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pontianak	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	121,130,650	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pontianak	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	121,130,650	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pontianak	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	517,965,200	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pontianak	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	517,965,200	
1.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pontianak	Persentase SOP yang dibuat	100%	2.815.751	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pontianak	Persentase SOP yang dibuat	100%	2.815.751	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	3.353.440.624	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	3.353.440.624	
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	17 dokumen/laporan	19.514.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	17 dokumen/laporan	19.514.700	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan	12 bulan	2.737.103.120	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan	12 bulan	2.737.103.120		
2.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaian	20 orang	16.860.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaian	19 orang	16.860.000		
2.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	308.211.291	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	308.211.291		
2.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	12 bulan	225.180.218	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	12 bulan	225.180.218		
<b>TOTAL</b>					<b>4.631.000.000</b>	<b>TOTAL</b>					<b>4.631.000.000</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini dimaksudkan untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024.

BPBD Kota Pontianak akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, organisasi kemasyarakatan, pemadam kebakaran swasta, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi BPBD dari pengamatan di lapangan dan melalui pelaksanaan musrenbang kecamatan.

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Pontianak**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kelurahan Benua Melayu Darat	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	50 orang	
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kelurahan Dalam Bugis	Persentase warga negara yang ikut pelatihan		
3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan Terhadap Bencana	Kelurahan Dalam Bugis	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	1 kelurahan	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN BPBD

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara garis besar arah tujuan pembangunan nasional tertuang dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik

Namun untuk mempercepat capaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020-2024 maka ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Adapun 6 (enam) pengarusutamaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kesetaraan Gender

Strategi pembangunan nasional harus memasukkan pespektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

4. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

5. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan

(mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan

#### 6. Transformasi Digital

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional

Keenam pengarusutamaan ini memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan.

Sejalan dengan 7 agenda pembangunan Nasional yang tertera di RPJMN IV tahun 2020-2024 poin ke- 6 yaitu **“Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”** yang kemudian di fokuskan pada pengarusutamaan dan masuk pada **poin ke - 4 yaitu Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim**. Maka BNPB sebagai badan / instansi di tingkat nasional yang bertugas untuk menangani masalah-masalah kebencanaan secara global seluruh Indonesia, sementara BPBD berada di tingkat kabupaten/kota bertugas untuk membantu walikota/bupati dalam hal menanggulangi bencana dengan program-program dan kegiatan yang mendukung strategi nasional dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Pontianak, BPBD Kota Pontianak sebagai institusi (Perangkat Daerah) yang mempunyai



tugas pokok di bidang penanggulangan bencana di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam mewujudkan rasa aman dari ancaman bencana.

Sebagai pengarusutamaan, kerentanan bencana dan perubahan iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon. Dengan indikator utama yaitu penurunan indeks risiko bencana. Hal ini didukung dengan program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait termasuk BPBD Kota Pontianak sebagai salah satu pendukung urusan bidang penanggulangan bencana khususnya di daerah Kota Pontianak.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD**

Dalam Rencana pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024, memuat visi pembangunan Kota Pontianak sebagai berikut :

*“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”*

Visi tersebut kemudian di jabarkan melalui 5 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yang mandiri, kreatif dan





berdaya saing

5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Sejalan dengan misi kelima Pemerintah Kota Pontianak diatas yakni “Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.”, BPBD Kota Pontianak diharapkan dapat melaksanakan program dan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya tujuan kedua dari misi walikota tersebut yakni “Terwujudnya kota yang aman dan tertib”. Dengan mengampu 1 (satu) Tujuan Utama BPBD yaitu “Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana” dengan sasaran strategis BPBD “Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana” yang dapat di ukur dengan Indikator Utama BPBD yaitu “Indeks Kapasitas Daerah” sesuai dengan tabel keterkaitan dibawah ini:



**TABEL 3.1**  
**KETERKAITAN ( INTERELASI ) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**  
**RENCANA STATAGIS TAHUN 2020-2024**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PONTIANAK**

Visi	Misi	Tujuan Kota	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1. Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat	2. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan.	2. Terwujudnya kota yang tertib dan aman	Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0.47	0.50	0.53	0.55	0.58	0.60	0.60

Sumber : Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020-2024

### **3.1 Program dan Kegiatan**

Badan Penanggulangan Bencana memiliki sasaran strategis yakni "meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana" dengan Indikator "Indeks Kapasitas Daerah" yang dapat di hitung dengan cara mengisi perangkat penilaian kapasitas daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) prioritas yang memiliki 71 indikator dengan 284 pertanyaan yang dikeluarkan oleh BNPB. Maka perumusan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dilakukan dalam rangka mendukung sasaran strategis tersebut yang juga telah tertuang didalam dokumen Renstra.

Dalam proses penyusunan program dan kegiatan Renja BPBD Kota Pontianak Tahun 2023, selain mengacu pada misi dan tujuan Kepala Daerah di atas, juga tetap mengacu pada Perubahan Renstra BPBD Kota Pontianak periode 2020 – 2024. Selain itu Penyusunan Program kegiatan maupun indikator program dan kegiatan telah disesuaikan dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) urusan bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Penyusunan Program dan kegiatan juga sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Kepmendagri No. 050-3708 tahun 2020

tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program kegiatan dan subkegiatan yang dimaksud meliputi :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan:
  - (1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - (2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - (3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - (4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD (5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

(6). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Penanggulangan Bencana

(1). Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

(2). Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota



- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
  - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - Penyusunan Rencana Kontijensi
  - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- (3). Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
  - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- (4). Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota



**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
BPBD**

**4.1 Rencana Kerja BPBD**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga sosial dituntut untuk menghasilkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Renja merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja BPBD merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) BPBD. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (Renja).



Sejalan dengan misi kelima Pemerintah Kota Pontianak yakni “Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan”, BPBD Kota Pontianak diharapkan dapat membuat program dan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya tujuan kedua dari misi tersebut yakni “Terwujudnya kota yang aman dan tertib” dengan berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan.

Seiring dengan perubahan nomenklatur program kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Kepmendagri No. 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Renstra BPBD Kota Pontianak juga mengalami perubahan. Perencanaan Strategis yang digunakan sebagai acuan saat ini adalah Perubahan Renstra BPBD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024.

#### **4.2 Pendanaan Program Kerja BPBD**

Pendanaan untuk mencapai rencana kerja yang telah ditetapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 berasal dari APBD Kota Pontianak. Pembagian dana berdasarkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak tahun 2022 adalah sebagai berikut:





**Tabel 4.1**  
**USULAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
1	5				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					<b>4,631,000,000</b>			<b>5.688.402.665</b>				
1	5	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>3,592,758,599</b>			<b>4.611.416.031</b>				
1	05	001	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>19,514,700</b>			<b>20,982,308</b>				
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/lapor an perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	9 Dokumen	17 Dokume n	7,750,100	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	8,575,875



**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	4 Laporan	17 Dokumen	5,634,700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	5,888,768
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	4 Laporan	17 Dokumen	6,129,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,517,665
1	05	001	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>2,737,103,120</b>					<b>3,482,930,153</b>	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyelenggaraa n administrasi keuangan		100 %	19 Orang/bulan	12 bulan	2,733,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian	100 %	3,478,350,000



**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
		pelayanan Kesekretariatan								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		terhadap pelayanan Kesekretariatan					
1	5	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan		100 %	1 Dokumen	12 bulan	3,603,120	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	4,580,153
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>001</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>16,860,000</b>				<b>53,320,770</b>			
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya		100 %	1 Paket	19 Orang	16,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	35,610,000
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya		100 %	2 Orang	19 Orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	17,710,770
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>001</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>231,919,488</b>				<b>355,693,158</b>			



*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraa n adminstrasi umum perangkat daerah		100 %	4 Paket	12 bulan	3,672,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	4,040,190
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraa n adminstrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Paket	12 bulan	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	132,192,033
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraa n adminstrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Paket	12 bulan	22,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	85,508,000
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraa n adminstrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Paket	12 bulan	29,473,588	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	17,418,555



*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 5 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		100 %	12 dokumen	12 bulan	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	5,107,410
1 5 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Laporan	12 bulan	102,398,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	111,426,970
<b>1 05 001 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>308,211,291</b>			<b>457,259,233</b>		
1 5 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	12 Laporan	12 bulan	76,233,091	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	95,481,727
1 5 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	12 Laporan	12 bulan	231,988,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	361,777,506
<b>1 05 001 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>225,180,218</b>			<b>241,230,409</b>		



**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100 %	9 Unit	55 Orang	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	153,715,744
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100 %	42 Unit	55 Orang	124,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	77,665,665
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100 %	1 Unit	55 Orang	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	9,849,000
1	5	3			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>								<b>1.038,241,401</b>		<b>1.076.986.634</b>		
1	05	003	2.01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>								<b>396,329,800</b>		<b>107,643,690</b>		



**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100 %	1 Dokumen	100 %	385,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %	0
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100 %	50 Orang	100 %	11,329,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %	107,643,690
1	05	003	2.02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>							<b>121,130,650</b>				<b>405,378,910</b>		



*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	5	3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Persentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %	1 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %	0
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %	50 Orang	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %	14,836,899
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %	1 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %	108,875,844





*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Persentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %	100 Unit	100 %	10,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %	30,000,000
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %	1 Kawasan	100 %	13,312,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %	87,025,728
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Persentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %	1 Dokumen	100 %	6,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %	97,750,000



**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %	50 Orang	100 %	20,788,250	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %	66,890,439
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>003</b>	<b>2.03</b>		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>							<b>517,965,200</b>				<b>560,406,029</b>		
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Laporan Kaji Cepat	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100 %	2 Dokumen	100 %	212,715,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %	153,487,072
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per	Persentase warga negara yang memperoleh layanan		100 %	27 Orang	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %	196,560,326



**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Jenis Kejadian Bencana	penyelamatan dan evakuasi korban bencana											
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100 %	40 Orang	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %	197,054,550
1	5	3	2.03	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100 %	1 Laporan	100 %	5,250,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %	13,304,081
1	05	003	2.04		<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>							<b>2,815,751</b>			<b>3,558,005</b>			



*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Persentase Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggara Penanggulanga n Bencana yang di buat		100 %	1 Dokumen	100 %	2,815,751	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %	3,558,005
<b>TOTAL</b>											<b>4,631,000,000</b>				<b>5.688.402.665</b>			



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak maka dapat menjadi patokan dalam evaluasi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan visi dan misi Walikota Pontianak. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 juga merupakan implementasi dari Perubahan Rencana Strategis Periode 2020-2024, dimana Renja ini menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2023 dengan tujuan untuk mendukung pencapaian misi kelima RPJMD Kota Pontianak, yaitu: Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Demikianlah Renja tahun anggaran 2023 ini dibuat. Harapan kami Renja ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, sehingga perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan bermanfaat bagi pembangunan masyarakat Kota Pontianak.

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Pontianak



Ir. Haryadi S. Triwibowo  
NIP. 19630227 199003 1 006